

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Keagenan

Teori keagenan membahas hubungan antara *prinsipal* (pemilik dan pemegang saham) dan *agen* (manajemen). Jensen dan Meckling (dalam Hikmah, dkk 2011) menyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih individu (*principal*) mempekerjakan individu lain (*agen*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan kekuasaan kepada *agen* untuk membuat suatu keputusan atas nama *principal* tersebut. Hal ini menjadi dasar perlunya manajemen melakukan pelaporan dan pengungkapan *corporate governance* kepada pemilik sebagai wujud akuntabilitas manajemen terhadap pemilik.

Teori keagenan mengasumsikan bahwa masing-masing individu cenderung untuk mementingkan diri sendiri. Manajer sebuah perusahaan mungkin memiliki tujuan-tujuan pribadi yang bersaing dengan tujuan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik pemegang saham. Hak yang dimiliki manajer untuk mengelola aset perusahaan, menimbulkan adanya konflik kepentingan antara dua kelompok. Teori keagenan mengasumsikan, dalam pasar modal dan tenaga kerja yang tidak sempurna, manajer akan berusaha untuk memaksimalkan *utilitas* mereka sendiri, dengan mengorbankan kepentingan para pemegang saham. Agen memiliki kemampuan untuk

beroperasi dengan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan terbaik perusahaan disebabkan oleh informasi yang bersifat tidak seimbang. Konflik antara agen dan prinsipal dapat diminimalkan dengan berbagai cara, salah satunya melalui pengungkapan *corporate governance* oleh manajemen. Sejalan dengan berkembangnya isu mengenai *corporate governance* yang di dalamnya terdapat prinsip transparansi dan akuntabilitas, akan meningkatkan perhatian terhadap masalah pengungkapan pada aspek *corporate governance* suatu perusahaan.

## 2. *Corporate Governance*

*Corporate governance* dapat dipahami sebagai aktivitas organ perseroan dalam menjalankan aktivitas korporasi sebagai badan hukum, baik secara intern maupun dalam hubungannya dengan para pemangku kepentingan yang berada di luar korporat (Wilmana, 2008). *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu sistem dimana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi. Sejalan dengan itu, maka struktur dari *corporate governance* menjelaskan distribusi hak-hak dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, yaitu antara lain dewan komisaris dan direksi, manajer, pemegang saham, serta pihak-pihak lain yang terkait sebagai *stakeholders*. Struktur dari *corporate governance* juga menjelaskan bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan dan pemutusan kebijakan sehingga dengan melakukan itu semua maka tujuan perusahaan dan pemantauan kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan baik (OECD,

1999). Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKKG) dalam Pedoman Umum *Corporate Governance* Indonesia tahun 2006 mengidentifikasi asas-asas yang melandasi penerapan *corporate governance* yaitu *transparansi*, *akuntabilitas*, tanggung jawab, *independensi*, serta kewajaran dan kesetaraan (Hikmah, 2011). Penjelasan asas-asas penerapan *corporate governance* tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Transparency* (Transparansi)

Objektivitas dalam praktek bisnis, dapat diwujudkan dan dipertahankan dengan cara perusahaan menyediakan informasi yang *relevan* dan *material* yang mudah diakses dan mudah dipahami bagi *stakeholder*. Perusahaan harus mempunyai inisiatif untuk mengungkapkan informasi tidak hanya yang diwajibkan oleh hukum dan regulasi, tetapi juga informasi lain yang dianggap penting bagi pemegang saham, kreditur dan *stakeholder* lain untuk pembuatan keputusan.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan wajar dan transparan. Perusahaan harus mengatur cara agar kepentingan perusahaan sejalan dengan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lain. Akuntabilitas itu sendiri adalah salah satu prasyarat untuk memperoleh kinerja berkelanjutan.

c. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Perusahaan harus mematuhi hukum, aturan dan memenuhi tanggung jawab kepada komunitas serta lingkungan dengan tujuan mempertahankan

kelangsungan bisnis jangka panjang sehingga dikenal sebagai perusahaan yang baik.

d. Independensi (Kemandirian)

Implementasi prinsip-prinsip *corporate governance* harus didukung dengan cara, perusahaan diatur secara independen oleh kekuasaan yang seimbang, dimana tidak ada salah satu organ perusahaan yang mendominasi organ lain dan tidak ada intervensi dari pihak lain.

e. Fairness (Kewajaran)

Perusahaan dalam melakukan aktivitasnya, harus mengutamakan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lain berdasarkan prinsip kewajaran.

(Rini, 2010) menyatakan pengungkapan *corporate governance* penting untuk dilakukan. Pengungkapan *corporate governance* yang akurat, tepat waktu, dan terbuka (*transparan*), maka akan menambah nilai (*value*) bagi semua *stakeholder*. Sebaliknya, tanpa adanya pengungkapan *corporate governance* yang luas, para *stakeholder* tidak dapat mengetahui kegiatan pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen benar-benar untuk kepentingan mereka.

### 3. Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan merupakan penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Kinerja perusahaan merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan dimana pun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan

perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Kinerja perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam menjelaskan kegiatan operasionalnya. Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja perusahaan dapat dilihat dari segi analisis laporan keuangan dan dari segi perubahan harga saham (Sabrinna, 2010).

Tobin's Q merupakan ukuran penilaian yang paling banyak digunakan dalam data keuangan perusahaan. Nama Tobin's Q berasal dari James Tobin dari Yale University setelah dia memperoleh hadiah nobel. Morck et al., (1988) dan McConnell et al., (1990) menggunakan Tobin's Q sebagai pengukuran kinerja perusahaan dengan alasan bahwa dengan Tobin's Q maka dapat diketahui nilai pasar perusahaan, yang mencerminkan keuntungan masa depan perusahaan seperti laba saat ini (Sabrinna, 2010).

Ada beberapa rasio untuk mengukur nilai pasar perusahaan, salah satu rasio yang dinilai bisa memberikan informasi yang paling baik adalah Tobin's Q. Menurut Sabrinna, (2010) semakin besar nilai rasio Tobin's Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik dan memiliki *intangible asset* yang semakin besar. Hal ini bisa terjadi karena semakin besar nilai pasar *asset* perusahaan, semakin besar kerelaan *investor* untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut. Perusahaan dengan nilai Tobin's Q yang tinggi biasanya memiliki *brand image* perusahaan yang sangat kuat, sedangkan perusahaan yang memiliki nilai

Tobin's Q yang rendah umumnya berada pada industri yang sangat kompetitif atau industri yang mulai mengecil (Sabrinna 2010).

#### 4. *Corporate Governance* Dalam Perusahaan BUMN

Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.19 tahun 2003 tentang BUMN, yang dimaksud BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat pula berupa perusahaan *nirlaba* yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat BUMN tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik.

BUMN utama berkembang dengan *monopoli* atau peraturan khusus yang bertentangan dengan semangat persaingan usaha sehat (UU no. 5 tahun 1999), tidak jarang BUMN bertindak sebagai pelaku bisnis sekaligus sebagai *regulator*. Pemerintah mengelola berbagai produksi BUMN, dengan tujuan untuk mencegah *monopoli* pasar atas barang dan jasa publik oleh perusahaan swasta yang kuat. Karena, apabila terjadi *monopoli* pasar atas barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan hidup orang banyak, maka dapat dipastikan rakyat kecil yang akan menjadi korban sebagai akibat dari tingkat harga yang cenderung meningkat.

*Corporate governance* itu sendiri adalah suatu praktik pengelolaan perusahaan secara amanah dan bijaksana dengan mempertimbangkan

keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh *stakeholder*. Perusahaan BUMN yang menerapkan pengungkapan *corporate governance* dengan baik maka akan berdampak pada pengelolaan sumber daya perusahaan yang *efisien, efektif, ekonomis* dan *produktif* dengan selalu berorientasi pada tujuan perusahaan dan memperhatikan *stakeholder approach*.

Perusahaan BUMN yang melakukan pengungkapan *corporate governance* dalam tatanan pengelolaan akan mendapatkan hasil yang lebih baik, disamping itu dengan adanya pengungkapan *corporate governance* akan mempermudah untuk mencapai tujuan dalam menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Selain itu hubungan antara BUMN dengan pengungkapan *corporate governance* adalah BUMN sebagai wadah dan pengungkapan *corporate governance* sebagai praktiknya, dimana dengan adanya pengungkapan *corporate governance* dalam suatu Badan Usaha Milik Negara akan ada keseimbangan hubungan antara *organ-organ* perusahaan, diantaranya rapat umum pemegang saham, komisaris dan direksi. Keseimbangan ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan *mekanisme operasional* ketiga organ perusahaan tersebut.

Pada kasus yang terjadi belakangan ini banyak BUMN yang mengalami kerugian dan banyak juga kasus korupsi. Peristiwa tersebut menjadikan peneliti ingin mengetahui variabel yang berpengaruh secara signifikan dapat meningkatkan dan menurunkan pengungkapan *corporate governance* dalam

perusahaan BUMN. Serta dengan menerapkan pengungkapan *corporate governance* akan mampu menyelamatkan perusahaan BUMN dari kebangkrutan dan meningkatkan laba, karena tata kelola pemerintahan dan BUMN yang baik membutuhkan pengungkapan *corporate governance* yang baik pula (Kartamulja, 2012).

## 5. Laporan Tahunan

Laporan tahunan merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih organisasi dalam setahun. Data dan informasi yang akurat menjadi kunci penulisan laporan tahunan. Isi dari laporan tahunan tersebut mencakup laporan keuangan dan prestasi akan kinerja organisasi selama satu tahun.

Laporan tahunan merupakan sumber utama dalam melakukan penelitian mengenai pengungkapan *corporate governance* karena laporan tahunan berisi tentang berbagai macam informasi mengenai perusahaan termasuk praktik pengungkapan *corporate governance* (Hikmah, dkk 2011). Pengungkapan *corporate governance* pada laporan tahunan tidak terbatas pada pengungkapan yang diwajibkan oleh pemerintah sehingga pengungkapan di luar persyaratan minimal dianggap sebagai pengungkapan sukarela.

Kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi perusahaan publik telah diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor:KEP-134/BL/2006. Peraturan tersebut mengatur kewajiban penyampaian laporan tahunan serta bentuk dan isinya. Peraturan tersebut juga memuat banyak informasi yang wajib disampaikan dalam laporan tahunan,



diantaranya disebutkan bahwa laporan tahunan wajib memuat uraian singkat mengenai pengungkapan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dalam periode laporan keuangan terakhir (Hikmah, dkk 2011).

#### **6. Luas Pengungkapan *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan**

Laporan tahunan merupakan sumber utama dalam melakukan penelitian mengenai pengungkapan *corporate governance*. Hal ini dikarenakan laporan tahunan berisi tentang berbagai macam informasi mengenai perusahaan termasuk pengungkapan *corporate governance*. Laporan tahunan harus dipertimbangkan sebagai sumber informasi paling penting mengenai perusahaan. Selain itu, tujuan yang mendasari adanya penelitian mengenai *corporate governance* dalam akuntansi adalah untuk menyediakan bukti sejauh mana informasi yang diberikan dalam sistem akuntansi dapat mengurangi masalah keagenan. Penelitian ini, menjelaskan pengungkapan *corporate governance* pada laporan tahunan tidak terbatas pada pengungkapan yang diwajibkan oleh pemerintah sehingga pengungkapan di luar persyaratan minimal dianggap sebagai pengungkapan sukarela (Hikmah, dkk 2011).

Penelitian ini, menggunakan *item* pengungkapan yang digunakan berasal dari pengungkapan wajib yang diatur dalam Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-134/BL/2006 Peraturan Nomor X.K.6 dan yang diperoleh dari Pedoman Umum *Corporate Governance* (KNKG, 2006) seperti pada penelitian Hikmah, dkk (2011) yang mengacu pada item pengungkapan *corporate governance* pada penelitian Rini, (2010). Berdasarkan peraturan dan pedoman tersebut, diperoleh sebanyak 16 indikator

pengungkapan yang terdiri dari pemegang saham; dewan komisaris; dewan direksi; komite audit; komite nominasi dan remunerasi; komite manajemen risiko; komite-komite lain yang dimiliki perusahaan; sekretaris perusahaan; pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal; manajemen risiko perusahaan; perkara penting yang dihadapi oleh perusahaan, anggota dewan direksi, dan anggota dewan komisaris; akses informasi dan data perusahaan; etika perusahaan; kegiatan sosial dan politik; pernyataan penerapan *corporate governance*; dan informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan *corporate governance*. Enam belas indikator tersebut memuat 103 *item* pengungkapan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu perusahaan telah mengungkapkan informasi mengenai *corporate governance* (Hikmah, dkk 2011).

## **7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan *Corporate Governance***

### **a. Ukuran Perusahaan**

Variabel ukuran perusahaan adalah variabel yang sering diteliti dalam hubungannya dengan luas pengungkapan *corporate governance*. Pengaruh ukuran perusahaan dengan luas pengungkapan dapat dijelaskan melalui teori agensi di mana dinyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil. Perusahaan besar akan melakukan pengungkapan *corporate governance* yang lebih luas dalam upaya mengurangi biaya keagenan (Hikmah, dkk 2011).

Terdapat beberapa *argumentasi* yang mendasar hubungan ukuran perusahaan dengan tingkat pengungkapan *corporate governance*. Pertama, perusahaan besar yang memiliki sistem informasi pelaporan yang lebih baik cenderung memiliki sumber daya untuk menghasilkan lebih banyak informasi dan biaya untuk menghasilkan informasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki keterbatasan dalam sistem informasi pelaporan. Kedua, perusahaan besar memiliki *insentif* untuk menyajikan pengungkapan sukarela, karena perusahaan besar dihadapkan pada biaya dan tekanan politik yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil. Ketiga, perusahaan kecil cenderung untuk menyembunyikan informasi penting dikarenakan *competitive disadvantage* (Hikmah, dkk 2011).

Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total *asset*, penjualan, dan *kapitalisasi* pasar. Ketiga variabel ini digunakan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut. Semakin besar aset, maka semakin banyak modal yang ditanamkan. Semakin besar penjualan, maka semakin banyak perputaran uang dan *kapitalisasi* pasar. Dari ketiga variabel ini, nilai aset relatif lebih stabil dibandingkan *kapitalisasi* pasar dan penjualan dalam mengukur ukuran perusahaan (Hikmah, dkk 2011).

#### **b. Umur Perusahaan**

Menurut Yularto dan Chariri (2003), umur perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan dapat tetap bertahan atau eksis, mampu bersaing, dan memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu perekonomian. Perusahaan yang memiliki umur lebih tua mungkin akan meningkatkan praktik pengungkapan

*corporate governance* dari waktu ke waktu. Hal ini dikarenakan perusahaan yang lebih tua dianggap telah memiliki lebih banyak pengalaman dalam pengungkapan *corporate governance*. Perusahaan yang telah memiliki pengalaman lebih banyak akan lebih memahami kebutuhan penggunanya dan informasi yang lebih detail mengenai perusahaan yang harus dibuka kepada pihak-pihak di luar manajemen yang berkepentingan terhadap perusahaan (Riri, 2010).

c. **Kepemilikan *Dispersi***

Masalah *corporate governance* muncul sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan. Perbedaan tersebut dapat dikaitkan dengan struktur kepemilikan yang ada dalam perusahaan. Struktur kepemilikan dalam perusahaan dapat dikelompokkan menjadi struktur kepemilikan terkonsentrasi dan menyebar (*dispersi*). Kepemilikan terkonsentrasi adalah kepemilikan *mayoritas* saham oleh pihak manajerial. Kepemilikan *dispersi* dapat diwakili oleh persentase saham yang dimiliki pemegang saham yang kepemilikannya  $\leq 5\%$  (Hikmah, dkk 2011).

Semakin terkonsentrasi kepemilikan saham, semakin sedikit informasi yang akan diungkapkan dalam laporan tahunan karena pihak manajemen mempunyai akses informasi yang luas tanpa harus melalui laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan atau manajemen sengaja menahan informasi untuk menghindari adanya pemanfaatan informasi yang diungkapkan oleh para pesaing perusahaan. Semakin menyebar kepemilikan saham, maka akan semakin luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan,

karena adanya keinginan publik untuk memperoleh informasi seluas-luasnya mengenai perusahaan tempat ia berinvestasi dan untuk mengawasi tindakan manajemen. Selain itu, pengungkapan *corporate governance* yang luas juga merupakan bentuk usaha pemegang saham pengendali untuk menyelaraskan kepentingan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham *minoritas*. Teori *agensi* menyatakan bahwa pengungkapan *corporate governance* akan lebih luas pada perusahaan yang struktur kepemilikannya lebih menyebar (Hikmah, dkk 2011).

d. ***Profitabilitas***

Sartono (2001) berpendapat bahwa *profitabilitas* adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Penelitian Shingvi dan Desai (1971) dalam Rahmawati, Mutmainah, dan Haryanto (2007) mengidentifikasi *profit margin* dan *earning return* sebagai variabel yang berhubungan secara positif dalam variasi yang ditentukan dalam luas pengungkapan *corporate governance* perusahaan dengan alasan *earning* yang lebih tinggi memotivasi manajemen untuk menyajikan informasi yang lebih banyak. Pihak manajemen ingin meyakinkan kepada pemilik atau investor tentang *profitabilitas* yang dicapai perusahaan agar mereka meningkatkan kompensasi untuk manajemen, untuk itu pihak manajemen melakukan pengungkapan *corporate governance* yang lebih luas (Hikmah, dkk 2011).

**e. Ukuran Dewan Komisaris**

Dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara *kolektif* untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *corporate governance*. Dewan komisaris tidak dibenarkan turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara. Tugas komisaris utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris (KNKG dalam Hikmah, dkk 2011)

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa dewan komisaris dibutuhkan untuk memonitor dan mengendalikan tindakan manajemen karena perilaku oportunistanya. Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan manajer dan *monitoring* yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan *corporate governance*, maka dengan adanya tekanan terhadap manajemen, pengungkapan *corporate governance* akan semakin luas.

**f. Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. kepemilikan saham manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para manajemen. Struktur kepemilikan manajerial dapat dijelaskan dari dua sudut pandang yaitu pendekatan keagenan (*agency*

*approach*) dan pendekatan ketidakseimbangan (*asymmetric information approach*). Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai sebuah instrument atau alat untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim (*claim holder*) terhadap perusahaan. Pendekatan ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara *insider* dan *outsider* melalui pengungkapan *corporate governance* (Sabrinna, 2010).

Gunarsih, 2004 (dalam Sabrinna, 2010) menyatakan bahwa kepemilikan perusahaan merupakan salah satu mekanisme yang dapat dipergunakan agar pengelola melakukan aktivitas sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Meningkatkan kepemilikan manajerial dapat digunakan sebagai cara untuk mengatasi masalah keagenan. Manajemen akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya yang juga merupakan keinginan dari para pemegang saham. Sabrinna, (2010) menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham pada perusahaan maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Kepemilikan saham manajerial akan membantu menyatukan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, sehingga manajemen ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah.

**g. Komite Audit**

Komite audit merupakan komite yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai penghubung antara dewan *direksi* dan audit eksternal, internal auditor serta anggota independen, yang memiliki tugas untuk memberikan pengawasan auditor, dan memastikan manajemen melakukan tindakan korektif yang tepat terhadap hukum dan regulasi (Jati, 2009). Komunikasi yang terjalin antara komisaris, direksi, auditor internal dan eksternal, merupakan aspek yang penting dalam menilai keefektifan dari komite audit Suryono (2011). Komunikasi akan mengarah kepada efektifitas komite audit. Komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek implementasi pengungkapan *corporate governance*, Effendi (2005). Komite audit sering digambarkan sebagai mekanisme monitoring yang dapat meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan. Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya (*relevance* dan *reliable*). Oleh karena itu komite audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan (*shareholders*) dan manajemen perusahaan, karena kedua belah pihak tersebut memiliki level informasi yang berbeda (Linda, dkk 2011).

Komite audit juga mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan oleh manajemen, tindakan tersebut seperti pengawasan penyajian laporan keuangan, pengawasan terhadap peraturan yang berlaku dan kepatuhan undang-undang. Komite audit bertugas



melakukan pengawasan terhadap kepatuhan manajemen terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, dan komite audit juga bertanggungjawab melaporkan hasil kerjanya kepada publik dengan cara meningkatkan luas pengungkapan *corporate governance*.

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Berbagai penelitian mengenai pengungkapan laporan tahunan telah dilakukan. Namun, masih sedikit penelitian yang meneliti tentang luas pengungkapan *corporate governance*. Hal ini mungkin disebabkan karena isu mengenai *corporate governance* baru muncul setelah krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997.

Hossain dan Khan (2006) melakukan survei pada 100 perusahaan sampel yang terdaftar di Dhaka Stock Exchange (DSE) dan atau Chittagong Stock Exchange (CSE) pada tahun 2004. Pada survei tersebut ditemukan adanya pengaruh signifikan dari karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan *corporate governance*. Karakteristik perusahaan tersebut diantaranya: perusahaan multinasional, hubungan auditor dengan *The Big Four*, kepemilikan terkonsentrasi oleh sponsor, dan perusahaan perbankan. Survei yang mereka lakukan, menggunakan indeks pengungkapan *corporate governance* berdasarkan pada 25 item pengungkapan *corporate governance*.

Bhuiyan dan Biswas (2007) melakukan survei mengenai pengungkapan *corporate governance* pada perusahaan perseroan terbatas yang terdaftar di Dhaka Stock Exchange (DSE) dengan menggunakan sampel secara acak sebanyak 155 perusahaan. Terdapat 45 item pengungkapan *corporate*

*governance* yang dipertimbangkan dalam survei mereka. Agar memudahkan analisisnya, maka digunakan *Corporate Governance Disclosure Index* (CGDI). Penelitian tersebut, diteliti tentang pengungkapan *corporate governance* dengan menggunakan karakteristik perusahaan sebagai variabel independennya. Karakteristik perusahaan terdiri dari besar perusahaan, kepemilikan lokal, perusahaan multinasional, lembaga keuangan, umur *listing* perusahaan, pemberitahuan SEC, dan ukuran dewan. Hasil penelitian membuktikan pengungkapan *corporate governance* dipengaruhi secara signifikan oleh kepemilikan lokal, pemberitahuan SEC, dan besar perusahaan. Sedangkan perusahaan multinasional, lembaga keuangan, umur *listing* perusahaan dan ukuran dewan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Kusumawati (2007) melakukan penelitian mengenai pengaruh *profitabilitas* terhadap luas pengungkapan *corporate governance* pada perusahaan publik yang terdaftar di JSX. Variabel kontrol yang digunakan terdiri dari: besar perusahaan, *listing* status, status auditor, kelompok industri, dan kepemilikan *dispersi*. Hasil penelitian membuktikan terdapat pengaruh negatif secara signifikan *profitabilitas* terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Variabel kontrol yang mempengaruhi secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance* adalah besar perusahaan, *listing* status, status auditor dan kelompok industri, sedangkan kepemilikan *dispersi* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Hikmah, dkk (2011) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Faktor-faktor tersebut adalah: ukuran perusahaan, umur *listing* perusahaan, kepemilikan *dispersi*, *profitabilitas*, dan ukuran dewan komisaris. Hasil penelitian tersebut membuktikan ukuran perusahaan dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*, sedangkan umur *listing* perusahaan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Variabel kepemilikan *dispersi*, dan *profitabilitas* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Selain penelitian yang disebutkan di atas, masih terdapat banyak penelitian untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap luas pengungkapan. Hasil dari penelitian tersebut akan diringkas pada tabel hasil penelitian berikut ini (Rini, 2010):

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil Penelitian
1	Subiyantoro (1998)	Luas kelengkapan pengungkapan	Total aktiva, total penjualan, rasio ungkitan, <i>rentabilitas</i> ekonomi, <i>profit margin</i> , rasio likuiditas, tipe industri	Luas kelengkapan pengungkapan dipengaruhi oleh total aktiva, rasio ungkitan, dan rasio likuiditas secara signifikan.
2	Suripto (1999)	Luas pengungkapan	<i>Size</i> , rasio ungkitan, rasio likuiditas,	<i>Size</i> , rasio ungkitan, rasio likuiditas, basis, waktu terdaftar, penerbitan

		sukarela	basis, waktu terdaftar, penerbitan sekuritas dan kelompok industri	sekuritas, dan kelompok industri perusahaan secara bersama-sama mempunyai kemampuan untuk menjelaskan variasi luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. <i>Size</i> dan penerbitan sekuritas berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela.
3	Gunawan (2000)	Luas pengungkapan informasi	Tingkat likuiditas, tingkat solvabilitas, besar perusahaan, jenis industri	Besar perusahaan dan tingkat solvabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan informasi.
4	Marwata (2000)	Kualitas ungkapan sukarela	Besar perusahaan, rasio ungkitan, rasio likuiditas, basis perusahaan, umur perusahaan, penerbitan sekuritas, struktur pemilikan	Besar perusahaan dan penerbitan sekuritas mampu menjelaskan variasi kualitas ungkapan sukarela.
5	Fitriani (2001)	Luas kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela	Besar perusahaan, tingkat <i>leverage</i> , tingkat likuiditas, status perusahaan, kelompok industri, <i>net profit margin</i> , jenis KAP	Besar perusahaan, status perusahaan, kelompok industri, <i>net profit margin</i> , dan jenis KAP berpengaruh terhadap luas pengungkapan wajib. Besar perusahaan, status perusahaan, <i>net profit margin</i> , dan jenis KAP berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Luas kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela dipengaruhi oleh besar perusahaan, status

				perusahaan, kelompok industri, <i>net profit margin</i> , dan jenis KAP.
6	Hadi dan Sabeni (2002)	Luas pengungkapan sukarela	<i>Size</i> perusahaan, proporsi kepemilikan saham oleh publik, basis perusahaan, solvabilitas, dan likuiditas	Luas pengungkapan sukarela dipengaruhi secara simultan oleh <i>size</i> perusahaan, proporsi kepemilikan saham oleh publik, basis perusahaan, solvabilitas dan likuiditas. Basis perusahaan dan ukuran perusahaan mempengaruhi luas pengungkapan sukarela.
7	Yularto dan Chariri (2003)	Luas pengungkapan sukarela	<i>Size</i> perusahaan, <i>leverage</i> , basis perusahaan, likuiditas, umur, reputasi KAP, prosentase saham publik	Size dan basis perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela tahun 1996 dan 1998. Umur dan reputasi KAP berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela untuk tahun 1996. Prosentase saham publik berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela untuk tahun 1998.
8	Simanjuntak dan Widiastuti (2004)	Luas kelengkapan pengungkapan	<i>Leverage</i> , likuiditas, profitabilitas, porsi saham publik, dan umur perusahaan	<i>Leverage</i> , likuiditas, profitabilitas, porsi saham publik, dan umur perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap luas kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. <i>Leverage</i> , profitabilitas, dan porsi saham publik berpengaruh terhadap luas kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.
9	Murtanto dan Elvina (2005)	Luas pengungkapan sukarela	Besaran perusahaan, rasio ungkitan, rasio likuiditas, basis perusahaan,	Tidak ada satupun variabel yang berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela.

			penerbitan saham, kelompok industri	
10	Sembiring (2005)	Luas pengungkapan tanggung jawab sosial	<i>Size</i> perusahaan, profile, ukuran dewan komisaris, <i>leverage</i> dan profitabilitas	<i>Size</i> perusahaan, profile dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Tingkat <i>leverage</i> dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
11	Alsaeed (2006)	Luas pengungkapan sukarela	<i>Size</i> perusahaan, rasio utang, <i>ownership dispersion</i> , umur perusahaan, <i>profit margin</i> , ROE, likuiditas, tipe industri, ukuran audit firm	Variabel yang memiliki hubungan secara signifikan dengan luas pengungkapan sukarela, yaitu ukuran perusahaan
12	Almilia dan Retrinasari (2007)	Luas kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela	Rasio likuiditas, rasio <i>leverage</i> , rasio <i>net profit margin</i> , besar perusahaan, status perusahaan	Rasio likuiditas, rasio <i>leverage</i> , besar perusahaan, dan status perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan wajib. Tidak ada variabel yang berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Rasio likuiditas, besar perusahaan, dan status perusahaan berpengaruh terhadap luas kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela.
13	Luciana Spica Almilia	kelengkapan pengungkapan	Rasio Likuiditas, Rasio	Rasio Likuiditas, Rasio Leverage, <i>Size</i> perusahaan, Status perusahaan,

	dan Ikka Retrinasari (2007)	pan laporan tahunan	Leverage, Rasio net profit margin, Size perusahaan, Status perusahaan,	berpengaruh secara signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan tahunan dan Rasio net profit margin tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kelengkapan pengungkapan laporan tahunan.
14	Deri Alambud iarti Supriadi (2010)	Kelengkapan pengungkapan laporan keuangan	Ukuran perusahaan, <i>Leverage</i> , <i>Likuiditas</i> , Porsi saham publik	Ukuran perusahaan, <i>Likuiditas</i> , Porsi saham publik berpengaruh secara signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.
15	Amilia Kartika Rini (2010)	Luas Pengungkapan <i>corporate governance</i>	besaran perusahaan, umur <i>listing</i> perusahaan, kepemilikan dispersi, perusahaan multinasional, ukuran dewan komisaris	Besaran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan <i>Corporate Governance</i> . Dan umur <i>listing</i> perusahaan, kepemilikan dispersi, perusahaan multinasional, ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan <i>Corporate Governance</i> .

Sumber: berbagai jurnal

### C. Hipotesis

#### 1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance*

Variabel ukuran perusahaan adalah variabel yang sering diteliti dalam hubungannya dengan luas pengungkapan *corporate governance*. Hasilnya pun cukup konsisten berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance* misalnya: Sutomo (2004); Bhuiyan dan Biswas (2007);

Rahmawati, Mutmainah, dan Haryanto (2007); Benardi K, Sutrisno, dan Assih (2009); Ariny (2010); Rini (2010); Hikmah, dkk (2011). Pengaruh ukuran perusahaan dengan luas pengungkapan *corporate governance* dapat dijelaskan melalui teori agensi, dimana dalam teori dinyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil (Hikmah, dkk 2011). Perusahaan besar akan mengungkapkan *corporate governance* yang lebih banyak dalam upaya mengurangi biaya keagenan.

Terdapat beberapa argumentasi yang mendasari hubungan ukuran perusahaan dengan tingkat pengungkapan *corporate governance*. Pertama, perusahaan besar yang memiliki sistem informasi pelaporan yang lebih baik cenderung memiliki sumber daya untuk menghasilkan lebih banyak informasi dan biaya untuk menghasilkan informasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki keterbatasan dalam sistem informasi pelaporan. Kedua, perusahaan besar memiliki insentif untuk menyajikan pengungkapan *corporate governance*, karena perusahaan besar dihadapkan pada biaya dan tekanan politik yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil. Ketiga, perusahaan kecil cenderung untuk menyembunyikan informasi penting dikarenakan *competitive disadvantage* (Hikmah, dkk 2011)

Penelitian yang dilakukan Kusumawati (2007), Rini, (2010), dan Hikmah, dkk (2011) membuktikan variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Penelitian tersebut tidak sesuai dengan penelitian Murtanto dan Elvina (2005) yang melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi luas



pengungkapan *corporate governance* terhadap laporan tahunan perusahaan, salah satu variabel yang digunakan adalah ukuran perusahaan yang hasil penelitiannya membuktikan ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

## **2. Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance***

Semakin lama umur perusahaan menunjukkan perusahaan tetap eksis (*survive*) di tengah persaingan bisnis dan situasi persaingan yang mengglobal dan berpengalaman dalam melakukan pengungkapan *corporate governance* dari tahun ke tahun (Sutomo, 2004). Perusahaan dengan umur yang lebih lama, dapat diperkirakan akan meningkatkan praktik pengungkapan *corporate governance* karena dianggap memiliki lebih banyak pengalaman dalam pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunannya dan lebih memahami kebutuhan pengguna informasi yang berkepentingan terhadap perusahaan (Rini, 2010).

Yularto dan Chariri (2002), Simanjuntak dan Widiastuti (2004), yang membuktikan umur perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Hikmah dkk, (2011) membuktikan arah hubungan negatif secara

signifikan. Penelitian tersebut tidak sesuai dengan penelitian Bhuiyan dan Biswas (2007) dan Rini (2010) yang melakukan penelitian dengan salah satu variabelnya adalah umur perusahaan, hasil penelitiannya membuktikan umur perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

### **3. Pengaruh Kepemilikan Dispersi terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance***

Masalah *corporate governance* muncul sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan. Perbedaan tersebut dapat dikaitkan dengan struktur kepemilikan yang ada dalam perusahaan. Struktur kepemilikan dalam perusahaan dapat dikelompokkan menjadi struktur kepemilikan terkonsentrasi dan menyebar (*dispersi*). Kepemilikan terkonsentrasi adalah kepemilikan mayoritas saham oleh pihak manajerial. Kepemilikan *dispersi* dapat diwakili oleh persentase saham yang dimiliki pemegang saham yang kepemilikannya  $\leq 5\%$  (Hikmah, dkk 2011).

Semakin terkonsentrasi kepemilikan saham, semakin sedikit informasi yang akan diungkapkan dalam laporan tahunan karena pihak manajemen mempunyai akses informasi yang luas tanpa harus melalui laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan atau manajemen sengaja menahan informasi

untuk menghindari adanya pemanfaatan informasi yang diungkapkan oleh para pesaing perusahaan. Semakin menyebar kepemilikan saham, akan semakin banyak pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan karena adanya keinginan publik untuk memperoleh informasi seluas-luasnya mengenai perusahaan tempat ia berinvestasi dan untuk mengawasi tindakan manajemen. Selain itu, pengungkapan *corporate governance* yang luas juga merupakan bentuk usaha pemegang saham pengendali untuk menyelaraskan kepentingan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas. Teori agensi menyatakan bahwa pengungkapan akan lebih luas pada perusahaan yang struktur kepemilikannya lebih menyebar (Hikmah, dkk 2011).

Khomsiyah (2003) melakukan analisis korelasi sederhana dalam meneliti hubungan antara implementasi *corporate governance* dengan tingkat pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan publik yang terdaftar di BEI. Penelitian ini membuktikan struktur kepemilikan publik mempunyai hubungan yang signifikan dengan indeks *corporate governance* dan pengungkapan informasi. Penelitian Nuryaman (2009) yang menguji pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap pengungkapan sukarela juga menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh publik berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan pada tingkat signifikansi 0,1. Jadi, semakin terdispersinya kepemilikan saham maka semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan. Tuntutan publik atas transparansi perusahaan untuk melakukan pengungkapan *corporate governance* yang lebih luas dalam laporan tahunan juga semakin besar dibandingkan dengan

perusahaan yang memiliki kepemilikan terkonsentrasi. Penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Alsaced (2006), dan Kusumawati (2007) yang membuktikan kepemilikan *dispersi* berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Sedangkan hasil penelitian Andersson dan Daoud (2005); Rini (2010); dan Hikmah, dkk (2011) membuktikan kepemilikan *dispersi* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis ketiga penelitian ini sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : Kepemilikan *dispersi* berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

#### 4. Pengaruh *Profitabilitas* terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance*

*Profitabilitas* menggambarkan kemampuan perusahaan mendapat laba melalui semua kemampuan, dan sumber daya yang ada. *Profitabilitas* adalah variabel yang secara luas diteliti dalam banyak penelitian yang berhubungan dengan pengungkapan misalnya: Kusumawati (2006); Rahmawati, Mutmainah, dan Haryanto (2007); Sudarmadji dan Sularto (2007); Benardi K., Sutrisno, dan Assih (2009); Ariny (2010)). Shingvi dan Desai (1971) dalam Rahmawati, Mutmainah, dan Haryanto (2007) mengidentifikasi *profit margin* dan *earning return* sebagai variabel yang berhubungan secara positif dalam variasi yang ditentukan dalam luas pengungkapan *corporate governance* perusahaan dengan alasan *earning* yang lebih tinggi memotivasi manajemen untuk menyajikan

informasi yang lebih banyak. Pihak manajemen ingin meyakinkan kepada pemilik atau investor tentang *profitabilitas* yang dicapai perusahaan agar mereka meningkatkan kompensasi untuk manajemen, untuk itu pihak manajemen melakukan pengungkapan *corporate governance* yang lebih luas.

*Profitabilitas* diukur menggunakan rasio *return on assets* (ROA), *return on equity* (ROE), *net interest margin* (NIM), dan tingkat efisiensi perusahaan. Penelitian ini, *profitabilitas* diukur menggunakan rasio *return on equity* (ROE). Pemilihan rasio ini berdasarkan argumen bahwa adanya *corporate governance* dimaksudkan terutama untuk kepentingan pemegang saham Jackson dan Carter (2005) dalam Kusumawati, (2006:9). Fokus kepada pemegang saham ini juga secara eksplisit dinyatakan dalam Pedoman Umum *Corporate Governance*, yaitu untuk mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya KNKG (dalam Hikmah, 2011).

Penelitian yang dilakukan Fitriani (2001), Simanjuntak dan Widiastuti (2004), Laraswita dan Indrayani (2010) mengidentifikasi *profitabilitas* sebagai variabel yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*, dengan alasan pendapatan yang lebih tinggi memotivasi manajemen untuk memperluas pengungkapan *corporate governance*. Sedangkan hasil penelitian Ariny (2010) yang menguji pengaruh *profitabilitas* terhadap luas pengungkapan sukarela yang menunjukkan hasil yang tidak signifikan, dan penelitian Hikmah, dkk (2011) yang membuktikan *profitabilitas* tidak mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance*.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis keempat penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H<sub>4</sub> : *Profitabilitas* berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

#### **5. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance***

Dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan pengungkapan *corporate governance*. Dewan komisaris tidak diperkenankan turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara. Tugas komisaris utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris (KNKG dalam Hikmah, dkk 2011).

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa dewan komisaris dibutuhkan untuk memonitor dan mengendalikan tindakan manajemen karena perilaku oportunistiknya. Sembiring (2005) menyatakan semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan manajer dan *monitoring* yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan *corporate governance*, maka dengan adanya tekanan terhadap manajemen, pengungkapan *corporate governance* akan semakin luas.

Sembiring (2005) melakukan penelitian mengenai karakteristik perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah ukuran dewan komisaris yang diproksi dengan jumlah anggota dewan komisaris. Hal ini mendukung hasil penelitian Arifin (2002) dan penelitian Hikmah, dkk (2011) yang menemukan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Bhuiyan dan Biswas (2007), dan Rini (2010) membuktikan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis kelima dapat dirumuskan sebagai berikut:

H<sub>5</sub> : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

## **6. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance***

Salah satu mekanisme yang dapat mengurangi masalah keagenan adalah dengan memperbesar kepemilikan saham oleh manajemen. Hal tersebut didasarkan pada logika bahwa peningkatan proporsi saham yang dimiliki manajer akan menurunkan kecenderungan manajer untuk melakukan tindakan yang berlebihan. Manajer yang memiliki proporsi kepemilikan manajerial yang cukup tinggi akan terpacu untuk meningkatkan kinerjanya dan merasa ikut memiliki perusahaan sehingga akan berusaha semaksimal mungkin melakukan tindakan-tindakan yang dapat memaksimalkan kemakmurannya sendiri. Saham

yang dimiliki manajer akan dapat mempersatukan kepentingan manajer dengan pemegang saham lainnya, hal ini akan berdampak positif bagi kinerja manajer dalam meningkatkan luas pengungkapan *corporate governance*.

Menurut Faisal (2005), besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan (*congruence*) kepentingan antara manajemen dengan *shareholders*. Semakin meningkatnya proporsi kepemilikan manajerial maka akan semakin baik luas pengungkapan *corporate governance*. Sehingga manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya yang juga merupakan keinginan dari para pemegang saham.

Sabrina, (2010) menjelaskan kepemilikan manajerial yang mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham akan memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang diambil, serta akan menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang khususnya adalah dirinya sendiri. Jumlah kepemilikan saham manajerial yang besar seharusnya memiliki kinerja yang lebih tinggi, karena *agency cost* yang berkurang.

Penelitian yang dilakukan Hadi dan Sabeni (2002), Simanjuntank dan Widiastuti (2004), dan Bambang irawan (2006) membuktikan kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Ainun dan



Fuat (2000), Marwata (2001), membuktikan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis keenam dapat dirumuskan sebagai berikut:

H<sub>6</sub>: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

#### **7. Pengaruh Komite Audit terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance***

Komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek implementasi *corporate governance* Effendi (2005). Komite audit sering digambarkan sebagai mekanisme monitoring yang dapat meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan. Dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya *relevance* dan *reliable*. Komite audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan (*shareholders*) dan manajemen perusahaan, karena kedua belah pihak tersebut memiliki level informasi yang berbeda.

Komite audit mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan oleh manajemen, tindakan tersebut seperti pengawasan penyajian laporan keuangan, pengawasan terhadap peraturan yang berlaku dan kepatuhan undang-undang. Komite audit bertugas melakukan pengawasan terhadap kepatuhan manajemen terhadap peraturan-

peraturan yang berlaku, dan komite audit juga bertanggungjawab melaporkan hasil kerjanya kepada publik dengan cara meningkatkan luas pengungkapan *corporate governance*.

Penelitian yang dilakukan Collier (1993), Waryanto (2010) dan Effendy (2005) membuktikan komite audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Santoso, (1992) dan Arifin et all (2001) membuktikan komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis ketujuh dapat dirumuskan sebagai berikut:

H<sub>7</sub>: Komite audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

#### **8. Analisis Tambahan Pengaruh Luas Pengungkapan *Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan**

Kinerja keuangan suatu perusahaan ditentukan oleh sejauh mana keseriusan menerapkan *corporate governance*. Secara teoritis, jika praktik pengungkapan *corporate governance* berjalan dengan efektif dan efisien maka seluruh proses aktivitas perusahaan akan berjalan dengan baik yang selanjutnya dapat meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan dewan dengan keputusan yang menguntungkan diri sendiri. Pengungkapan *corporate governance* juga dapat meningkatkan kepercayaan

investor untuk menanamkan modalnya yang juga akan berdampak pada kinerja perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hastuti (2005) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara *corporate governance* yang diproksikan dengan transparansi dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan Tobin's Q. Hal ini didukung oleh penelitian Klapper dan Love (2002) seperti yang dikutip Darmawati dkk, (2005) yang menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q.

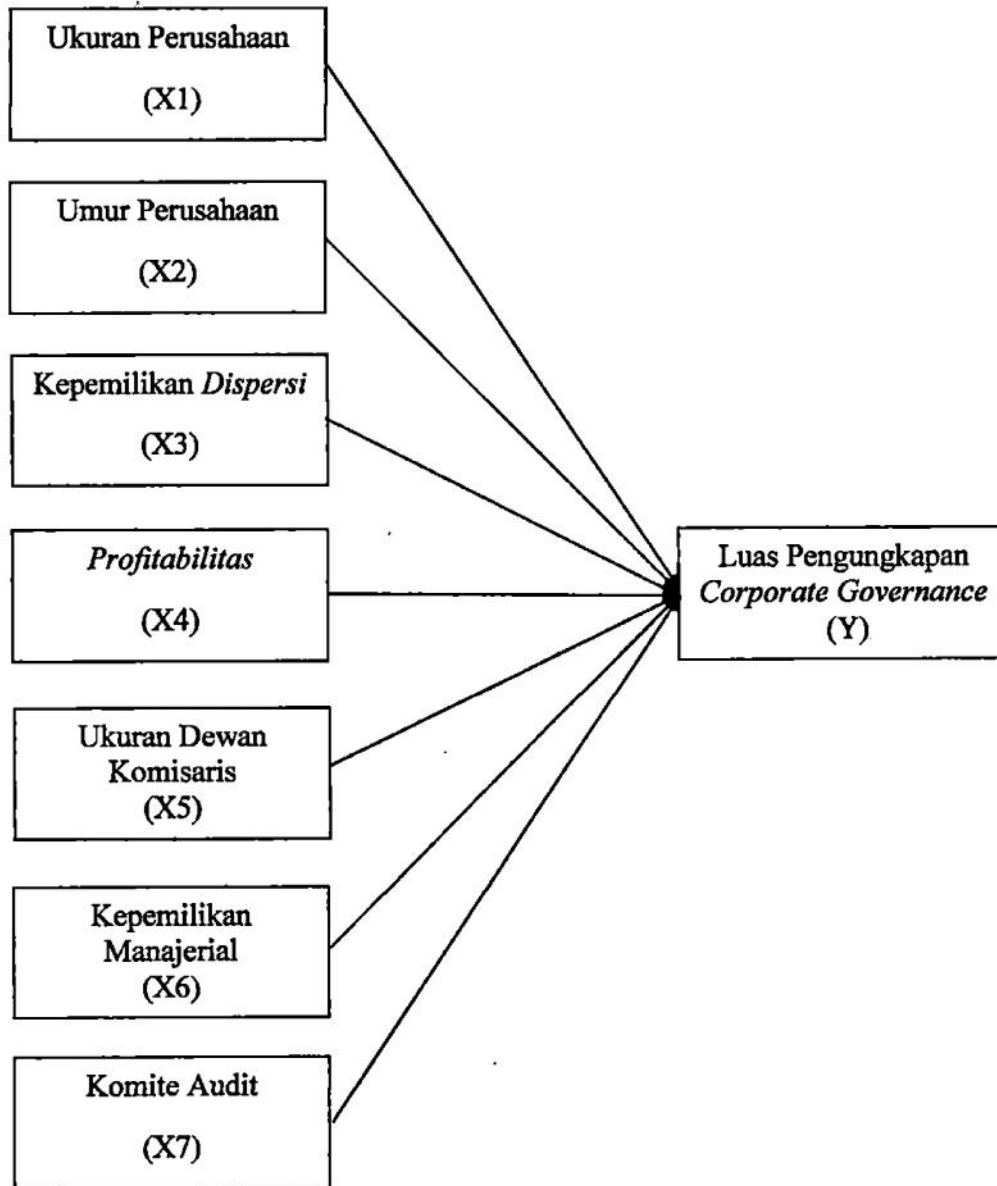
Dalam penelitian Hidayah (2008) pengukuran *corporate governance* dengan menggunakan *Corporate Governance Perception Indeks* (CGPI) dan pengukuran kinerja dengan Tobin's Q sebagai ukuran penilaian pasar dan *Return On Equity* (ROE) sebagai ukuran kinerja operasional diyakini bisa memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan yang baik, karena esensi penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan. Perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance* secara baik akan memiliki kinerja operasional yang baik dan akan diikuti oleh kinerja pasar yang tampak pada nilai saham perusahaan sehingga dapat diprediksi bahwa perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip *corporate governance* yang lebih baik akan cenderung mempunyai kinerja perusahaan yang lebih baik pula. Sedangkan hasil penelitian Sukamulja (2004), Johnson, dkk (2000) Suranta dan Machfoedz (2003) membuktikan luas pengungkapan *corporate governance* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis kedelapan dapat dirumuskan sebagai berikut:

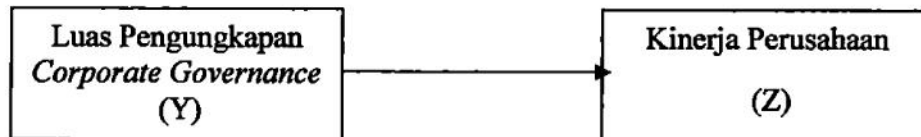
H<sub>8</sub> : Luas pengungkapan *corporate governance* pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

#### **D. Kerangka Pemikiran Penelitian**

Penelitian ini, akan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance* pada laporan tahunan perusahaan BUMN di Indonesia dan pengaruh luas pengungkapan *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen Y yaitu luas pengungkapan *corporate governance* pada laporan tahunan perusahaan dan Variabel dependen Z adalah kinerja perusahaan. Variabel independen X pada persamaan 1 (satu) terdiri dari tujuh variabel, yaitu ukuran perusahaan, umur perusahaan, kepemilikan *dispersi*, *profitabilitas*, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, dan komite audit. Variabel independen pada persamaan 2 (dua) terdiri dari satu variabel yaitu luas pengungkapan *corporate governance*. Berdasarkan uraian tersebut, model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Model Penelitian**  
**(Persamaan 1)**



**Gambar 2.2**  
**Model Penelitian**  
**(Persamaan 2)**